



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN 2025 AUDITED

Bagan Anggaran

022.05.1600.KD.465678

Tahun Anggaran

2025



Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab II Pasal 9 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang akan disampaikan kepada Unit Eselon I.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Balikpapan, 29 April 2026 /
Kepala Kantor,


Ferdinan Nurdin, S.H, S.SiT, M.M Tr
NIP. 19780623 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii-iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v-vi
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Laporan Operasional	2
III Laporan Perubahan Ekuitas	3
IV Neraca	4-5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Pajak	
B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	22
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jkg Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	

C.25	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	
F.1	Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	54
F.2	Capaian Rincian Output	54-55
F.3	Program Prioritas Nasional	56-59
VI.	Lampiran	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

JL. MARSMA R. ISWAHYUDI NO.1
BALIKPAPAN 76115

TELP. : (0542) 763002
: (0542) 763022
FAX : (0542) 763012

Email :
kobuwilayahvii@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balikpapan, 29 April 2026

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Ferdinand Murdin, S.H, S.SiT, M.M Tr

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780623 200012 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Tahunan 2025 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.732.750.620; berupa pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.732.750.620; atau mencapai 86.22 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.009.717.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.042.561.592; atau mencapai 79.01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp44.354.129.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp674.322.869.233; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp150.967.060; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp674.076.979.136; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp94.923.037,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp94.923.037; dan Rp674.227.946.196;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.732.747.897; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp36.693.530.570; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp-34.960.782.673; Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-58.371.990; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-35.019.154.663,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp676.145.753.786,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-35.019.154.663,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-208.463.899,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp33.309.810.972,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp674.227.946.196,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	1.732.750.620	-	1.877.527.629
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.732.750.620	-	1.877.527.629
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	15.933.849.725	-	13.869.876.895
Belanja Barang	B.2.2	-	16.248.532.660	-	22.299.127.143
Belanja Modal	B.2.3	-	2.860.179.207	-	6.521.888.685
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	35.042.561.592	-	42.490.892.523



Balikpapan, 29 April 2026

Kepala Kantor

Kerdman Nurdin, S.H, S.Si.T, M.M Tr
NIP. 19780623 200012 1 001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1.732.747.897	1.824.227.412
Jumlah Pendapatan		1.732.747.897	1.824.227.412
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	15.933.849.725	13.669.876.695
Beban Persediaan	D.4	234.152.830	525.511.842
Beban Barang dan Jasa	D.5	6.182.845.366	9.463.059.667
Beban Pemeliharaan	D.6	4.810.178.438	3.625.216.019
Beban Perjalanan Dinas	D.7	5.061.777.186	8.717.041.775
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	4.470.727.025	4.110.158.958
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		38.693.530.570	40.110.864.954
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(34.960.782.673)	(38.286.637.542)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(58.374.713)	(718.997.201)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	2.723	217
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(58.371.990)	(718.996.984)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(35.019.154.663)	(39.005.634.526)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(35.019.154.663)	(39.005.634.526)

Balikpapan, 29 April 2026

Kepala Kantor



Ferdinand Nurdin, S.H, S.Si.T, M.M Tr
NP. 19780623 200012 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	676.145.753.786	674.560.937.728
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(35.019.154.683)	(39.005.634.526)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(208.463.899)	(22.914.310)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(208.463.899)	(22.914.310)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(208.463.899)	(22.914.310)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	33.309.810.972	40.613.364.894
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.917.807.590)	1.584.816.058
EKUITAS AKHIR	E.6	674.227.946.196	676.145.753.786

Balikpapan, 29 April 2026
Kepala Kantor



Ferdinan Nurdin, S.H, S.Si.T, M.M Tr
NIP. 19780623 200012 1 001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

	URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Selara Kas	C.3	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
	Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
	Piutang Perpajakan	C.7	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan P	C.14	-	-
	Persediaan	C.15	150.967.060	190.389.220
	Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
	Jumlah Aset Lancar		150.967.060	190.389.220
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
	Piutang Jangka Panjang/lainnya	C.19	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI				
	Properti investasi	C.21	-	-
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.23	600.937.678.000	600.937.678.000
	Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
	Peralatan dan Mesin	C.25	44.606.416.936	46.309.416.581
	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
	Gedung dan Bangunan	C.27	76.170.554.684	74.819.298.712
	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	12.007.142.722	9.811.897.072
	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
	Aset Tetap Lainnya	C.31	-	493.689.027
	Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(59.644.813.208)	(56.416.614.826)
	Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
	Jumlah Aset Tetap		674.076.979.136	675.955.364.566
ASET LAINNYA				
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
	Aset Tak Berwujud	C.38	1.007.600.000	1.007.600.000
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	94.923.037	1.082.483.272
	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
	Aset Lain-lain	C.42	-	-
	Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(1.007.600.000)	(1.007.600.000)
	Jumlah Aset Lainnya		94.923.037	1.082.483.272
JUMLAH ASET			674.322.869.233	677.228.237.058
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	94.923.037	1.082.483.272
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
	Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		94.923.037	1.082.483.272
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		94.923.037	1.082.483.272
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	674.227.946.196	676.145.753.786
JUMLAH EKUITAS		674.227.946.196	676.145.753.786
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		674.322.869.233	677.228.237.058

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis
Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tugas utamanya melaksanakan pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Maka Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara dalam wilayah kerja.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;

- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Struktur Organisasi

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VII (Eselon III.a) | : FERDINAN NURDIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780623 200012 1 001 |
| 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
(Eselon IV.a) | : TARMADI
Pembina (IV/a)
NIP. 19720529 199303 1 001 |
| 3. Kepala Seksi
Pelayanan & Pengoperasian
Bandar Udara (Eselon IV.a) | : AHADIAT ADHI YUDISTIRA
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820219 201012 1 002 |
| 4. Kepala Seksi
Keamanan, Angkutan Udara Dan
Kelaikudaraan (Eselon IV.a) | : ABDUL FAQIH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19790529 200212 1 001 |

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.009.717.000	-
Jumlah Pendapatan	2.009.717.000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	15.963.705.000	-
Belanja Barang	25.528.796.000	-
Belanja Modal	2.861.628.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	44.354.129.000	-

Realisasi
Pendapatan
Rp1.732.750.620

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.732.750.620 atau mencapai 86.22 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.009.717.000. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.732.750.620. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendapatan penerimaan dari Jasa Kebandarudaraan (PAS) dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% terhadap anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.009.717.000	1.732.750.620	86.22
Jumlah	2.009.717.000	1.732.750.620	86.22

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 7.71 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.732.750.620	1.877.527.629	(7.71)
Jumlah	1.732.750.620	1.877.527.629	(7.71)

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1.732.750.620 dan Rp1.877.527.629. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,71 dari TA 2024 Pendapatan penerimaan dari Jasa Kebandarudaraan (PAS) dan pendapalan sewa tanah, gedung dan bangunan mengalami penurunan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.732.750.620	1.877.527.629	(7,71)
Jumlah	1.732.750.620	1.877.527.629	(7,71)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	1.389.450.000	1.585.975.000	(12,39)
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	-	-	-
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	-	-	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	271.850.000	143.200.000	89,84
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	21.946.777	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.723	217	1.154,84
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	53.300.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	49.501.120	95.052.412	(47,92)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.732.750.620	1.877.527.629	(7,71)

B.2 Belanja

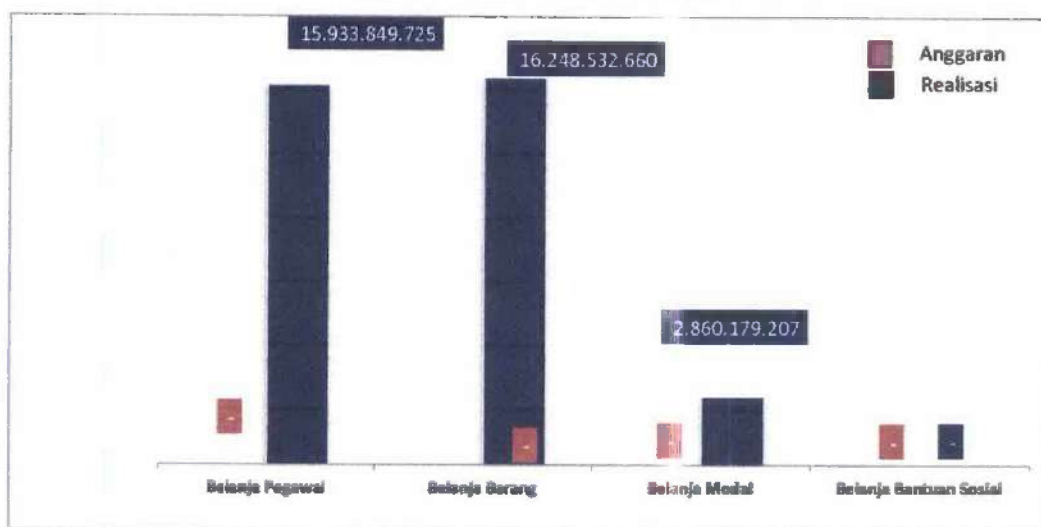
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp35.042.561.592 atau 34.97% dari anggaran belanja sebesar Rp39.913.107.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	15.963.705.000	15.933.849.725	99.81
Belanja Barang	25.528.796.000	16.248.532.660	63.65
Belanja Modal	2.861.628.000	2.860.179.207	99.95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	44.354.129.000	35.042.561.592	79.01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 17,53% adanya kebijakan Pemerintah terkait efisiensi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	15.933.849.725	13.669.876.695	16,56
Belanja Barang	16.248.532.660	22.299.127.143	(27,13)
Belanja Modal	2.860.179.207	8.521.888.685	(56,14)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	35.042.561.592	42.490.892.523	(17,53)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.933.849.725 dan Rp13.669.876.695. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 16,56 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya Pembayaran Kekurangan Gaji PNS sebanyak 14 orang (CPNS menjadi PNS), Pembayaran Gaji Susulan CPNS sebanyak 6 orang, Pembayaran Gaji Induk 1 Orang pegawai, Kenaikan Gaji Berkala 5 pegawai dan Kenaikan Pangkat Pegawai 15 pegawai serta pembayaran gaji susulan, Tukin dan uang makan pegawai P3K sebanyak 25 orang pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.329.164.600	4.193.393.900	3,24
Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.139	78.079	(17,85)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	231.624.740	222.184.990	4,25
Belanja Tunj. Anak PNS	74.031.388	72.445.728	2,19
Belanja Tunj. Struktural PNS	41.580.000	35.280.000	17,86
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	16.380.061	15.644.392	4,70
Belanja Tunj. Beras PNS	224.067.480	222.256.980	0,81
Belanja Uang Makan PNS	671.745.000	601.949.000	11,60
Belanja Tunjangan Umum PNS	244.405.000	246.140.000	(0,70)
Belanja Uang Lembur	567.513.000	264.149.000	114,85
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.954.858.667	7.533.587.831	5,59
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	15.933.849.940	13.670.249.813	16,56
Pengembalian Belanja Pegawai	215	373.118	(99,94)
Jumlah Belanja	15.933.849.725	13.669.876.695	16,56

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.248.532.660 dan Rp22.299.127.143. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 27,13% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	3.305.387.776	4.920.894.538	(32,83)
Belanja Barang Non Operasional	1.858.452.101	2.471.395.724	(24,80)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	199.373.730	540.290.520	(63,10)
Belanja Jasa	1.018.039.789	2.030.346.607	(49,86)
Belanja Pemeliharaan	4.805.535.378	3.619.157.979	32,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.061.777.186	8.717.041.775	(41,93)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	16.248.565.960	22.299.127.143	(27,13)
Pengembalian Belanja	33.300	-	-
Jumlah Belanja	16.248.532.660	22.299.127.143	(27,13)

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.860.179.207 dan Rp6.521.888.685. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 56,14% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.933.557	2.365.292.977	(71,89)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.156.595.708	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.195.245.650	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.860.179.207	6.521.888.685	(56,14)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.860.179.207	6.521.888.685	(56,14)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp664.933.557

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp664.933.557 dan Rp2.365.292.977, mengalami penurunan sebesar 71,89 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah terkait efisiensi anggaran..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664.933.557	2.365.292.977	(71,89)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	664.933.557	2.365.292.977	(71,89)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	664.933.557	2.365.292.977	(71,89)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.156.595.708 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.156.595.708	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	4.156.595.708	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	4.156.595.708	(100,00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.195.245.650 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited)
TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp150.967.060

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp150.967.060 dan Rp190.389.220. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	150.897.760	189.939.260
Bahan untuk Pemeliharaan	69.300	449.960
Jumlah	150.967.060	190.389.220

Persediaan tersebut di atas untuk Tahun 2025 lebih rendah karena adanya kebijakan dari Pemerintah terkait efisiensi anggaran

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp600.937.678.000 dan Rp600.937.678.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	600.937.678.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi kurang :	-
Transfer Keluar	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	600.937.678.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum
Diregister Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp. 44.606.416.963

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 44.606.416.963,- dan Rp. 46.309.416.581. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025		46.309.416.581
Mutasi tambah:		
Pembelian		664.933.557
Transfer masuk		-
Reklasifikasi Masuk		506.901.100
Koreksi Nilai Bertambah		420.719.000
perolehan Lainnya		573.800.000
Mutasi Kurang:		
Hibah Keluar		-
Transfer Keluar		-
Reklasifikasi Keluar		506.901.100
Koreksi Pencatatan		994.519.000
Koreksi Nilai Berkurang		-
Saldo per 31 Desember 2025		44.606.416.963
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(39.801.585.287)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		4.804.831.649

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa :

- a. Reklasifikasi Masuk Aset berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 7 Nup
- a. Koreksi Nilai bertambah Aset berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 3 Nup
- c. perolehan Lainnya Aset berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 73 Nup

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa :

- a. Reklasifikasi Keluar Aset berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 7 Nup
- b. Koreksi Pencatatan Aset Peralatan dan Mesin sebanyak 6 Nup

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada lampiran laporan keuangan ini

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister
Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan Rp
76.170.554.684,-

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.170.554.684,- dan Rp.74.819.298.712,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	74.819.298.712
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer masuk	-
Reklasifikasi Masuk	9.946.853
Koreksi Nilai Bertambah	2.064.831.113
perolehan Lainnya	812.391.892
Mutasi Kurang:	
Hibah Keluar	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	9.946.853
Koreksi Pencatatan	826.687.371
Koreksi Nilai Berkurang	1.556.846.607
Saldo per 31 Desember 2025	76.170.554.684
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(13.128.068.888)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	63.042.485.796

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa :

- Koreksi Nilai Bertambah Gedung dan Bangunan sebanyak 3 Nup
- perolehan lainnya Gedung dan Bangunan sebanyak 2 Nup
- Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Nup

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa :

- Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan sebanyak 8 Nup
- Koreksi Nilai Berkurang Gedung dan Bangunan sebanyak 2 Nup
- Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Nup

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 12.007.142.722,-

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.12.007.142.722,- dan Rp.9.811.897.072,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	9.811.897.072
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Bertambah	188.990.206
Pengembangan Langsung	2.195.245.650
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	188.990.206
	-
Saldo per 31 Desember 2025	12.007.142.722
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(6.715.159.031)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.291.983.691

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa :

- a. Koreksi Nilai Bertambah Irigasi sebanyak 1 NUP
- a. Pengembangan Langsung Jalan sebanyak 1 NUP

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa :

- a. Koreksi Pencatatan Irigasi sebanyak 1 NUP

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp.0

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0 dan Rp.493.689.027. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	493.689.027
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi pencatatan	493.689.027
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

- a. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi sebanyak 1 NUP

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp59.644.813.206

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp59.644.813.206 dan Rp56.416.614.826. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	44.606.416.936	(39.801.585.287)	4.804.831.649
2	Gedung dan Bangunan	76.170.554.684	(13.128.068.888)	63.042.485.796
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.007.142.722	(6.715.159.031)	5.291.983.691
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		132.784.114.342	(59.644.813.206)	73.139.301.136

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.007.600.000 dan Rp1.007.600.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	1.007.600.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	1.007.600.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(1.007.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.	-
b.	-
c.	-
d.	-
e.	-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp94.923.037

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp94.923.037 dan Rp1.082.483.272. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana di Rekening penampungan-kementerian/lembaga	94.923.037	(1.082.483.272)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	94.923.037	(1.082.483.272)

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Pembayaran Outsourcing Cleaning Service sesuai BAST Nomor 09/OBU.VII-PPK.BAST.CS/XII/2025 Tanggal31-12-2025 BAP Nomor 09/OBU.VII-PPK.BAP.CS/XII/2025 tanggal 31-12-2025.

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 1.007.600.000

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.007.600.000 dan Rp1.007.600.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.007.600.000	(1.007.600.000)	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	1.007.600.000	(1.007.600.000)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp94.923.037

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp94.923.037 dan Rp1.082.483.272. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	94.923.037	1.082.483.272
-	-	-
Total	94.923.037	1.082.483.272

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Pembayaran Outsourcing Cleaning Service sesuai BAST Nomor 09/OBU.VII-PPK.BAST.CS/XII/2025 Tanggal 31-12-2025 BAP Nomor 09/OBU.VII-PPK.BAP.CS/XII/2025 tanggal 31-12-2025.

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp674.227.946.196

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp674.227.946.196. dan Rp676.145.753.786. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.732.747.897

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.732.747.897 dan Rp1.824.227.412. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,01. Hal tersebut disebabkan oleh Berkurangnya pendapatan yang bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan, pmbutan PAS. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	49.501.120	95.052.412,00	(47,92)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	21.946.777	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi	-	-	-
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	1.389.450.000	1.585.975.000,00	(12,39)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	271.850.000	143.200.000,00	89,84
	-	-	-
Jumlah	1.732.747.897	1.824.227.412	(5,01)

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.933.849.725 dan Rp13.669.876.695.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 16,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan Pembayaran Kekurangan Gaji PNS sebanyak 14 orang (CPNS menjadi PNS), Pembayaran Gaji Susulan CPNS sebanyak 4 orang, Pembayaran Gaji Induk 1 orang pegawai serta adanya Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat Pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.329.164.600	4.193.393.900	3,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.924	74.981	(14,72)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	231.624.740	222.184.990	4,25
Beban Tunj. Anak PNS	74.031.388	72.445.728	2,19
Beban Tunj. Struktural PNS	41.580.000	35.280.000	17,86
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	16.380.081	15.644.392	4,70
Beban Tunj. Beras PNS	224.067.480	222.256.980	0,81
Beban Uang Makan PNS	671.745.000	601.949.000	11,60
Beban Tunjangan Umum PNS	244.405.000	245.770.000	(0,56)
Beban Uang Lembur	567.513.000	264.149.000	114,85
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.954.858.667	7.533.587.831	5,59
Belanja Gaji Pokok PPPk	551.059.433	79.852.900	590,09
Belanja Pembulatan Gaji PPPk	8.953	1.555	475,76
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	44.783.283	4.781.690	836,56
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	8.100.000	(6,67)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.225.690	2.896.800	1.219,58
Belanja Uang Makan PPPK	137.189.000	11.803.000	1.062,32
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatann/Kinerj	759.576.132	155.703.968	387,83
Belanja Tunjangan anak PPPK	8.623.354	-	-
Jumlah	15.933.849.725	13.669.876.695	16,56

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp234.152.830 dan Rp525.511.842

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 55,44 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Mengalami penurunan karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	234.152.830	525.511.842	(55,44)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	234.152.830,00	525.511.842	(55,44)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.182.845.366 dan Rp9.463.059.667.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 34,66 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran berupa penghematan penggunaan daya dan jasa (adanya metode WFA dan WFO bagi pegawai) dan penghematan penggunaan ATK atau barang konsumsi (paperless). Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.851.878.177	2.419.613.300	(23,46)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	9.052.650	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	632.850	5.292.000	(88,04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146.640.000	82.896.000	76,90
Beban Barang Operasional Lainnya	1.306.236.749	2.404.040.588	(45,66)
Beban Bahan	1.742.342.525	1.501.909.842	16,01
Beban Honor Output Kegiatan	24.000.000	57.073.524	(57,95)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	92.109.576	912.412.358	(89,90)
Beban Langganan Listrik	614.530.535	743.916.559	(17,39)
Beban Langganan Telepon	48.883.450	64.519.890	(24,24)
Beban Langganan Air	20.401.900	55.649.273	(63,34)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	322.192.604	361.865.307	(10,96)
Beban Jasa Konsultansi	-	-	-
Beban Sewa	11.998.000	804.395.578	(98,51)
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	999.000	5.000.000	(80,02)
Beban Gedung dan Bangunan-Eksrakomptabel	-	35.422.796	(100,00)
Jumlah	6.182.845.366	9.463.059.667,00	(34,66)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.810.178.438 dan Rp3.625.216.019.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 32,69 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya Realisasi pemeliharaan pada Tahun 2025 berupa pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pengecatan ruang auditorium), pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan lift, hydrant, perbaikan kendaraan roda empat dan genset), pemeliharaan jaringan (pemeliharaan jaringan listrik dan PJU ruang DWP), pemeliharaan jalan dan jembatan (pemeiharaan drainase dan parit taman dan perbaikan mess. Rincian Beban Pemeliharaan

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.366.757.306	1.678.606.232	41,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.627.876.560	1.501.309.171	8,43
Beban Pemeliharaan Jaringan	448.491.860	242.878.725	84,66
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.643.060	6.058.040	(23,38)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	362.409.652	196.363.851	84,56
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	4.810.178.438	3.625.216.019	32,69

Beban Perjalanan Dinas
Rp5.061.777.186

D.7 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.061.777.186 dan Rp8.717.041.775

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 41,93 persen disebabkan oleh perjalanan dinas yang biasa dilakukan secara luring karena adanya efisiensi anggaran dilakukan secara daring . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	5.029.032.186	8.599.644.295	(41,52)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	117.397.480	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.745.000	-	-
Jumlah	5.061.777.186,00	8.717.041.775	(41,93)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 **Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp4.470.727.025

D.10 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.470.727.025 dan Rp4.110.158.956.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.642.183.770	1.889.800.726	(13,10)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.556.250.049	1.513.105.659	2,85
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.133.493.417	588.568.758	92,58
Beban Penyusutan Irigasi	56.207.051	47.969.017	17,17
Beban Penyusutan Jaringan	70.714.796	70.714.796	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	11.877.942	-	-
Jumah Penyusutan	4.470.727.025	4.110.158.956	8,77
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	4.470.727.025	4.110.158.956	8,77

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-58.374.713

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-58.374.713 dan Rp-718.997.201

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	53.300.000,00	(100)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(58.374.713)	(772.297.201,00)	(92)
Jumlah	(58.374.713,00)	(718.997.201)	(92)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp2.723

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.723 dan Rp217.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.723	217,00	1.154,84
	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	2.723,00	217	1.154,84

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.676.145.753.786,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.676.145.753.786,00 dan Rp.674.560.937.728,00

Defisit LO
Rp.35.019.154.663,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.35.019.154.663,00 dan Rp.39.005.634.526,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-208.463.899 dan Rp.-22.914.310 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-
208.463.899

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-208.463.899 dan Rp.-22.914.310. .

Koreksi ini Dikarenakan jumal yang terbentuk dari modul aset tetap, dikarenakan adanya perbaikan pencacatan BMN yang telah mengalami penyusutan diantaranya : 1. Perolehan Aset lainnya 72 NUP. 2. Koreksi Perubahan Nilai Bertambah 8 NUP. 3. Koreksi Perubahan Nilai Berkurang 5 NUP. 4. Koreksi Pencatatan sebanyak 19 NUP.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(208.463.899)
Jumlah	(208.463.899,0)

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp33.309.810.972

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.33.309.810.972 dan Rp.40.613.364.894. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	35.042.561.592
Diterima dari Entitas Lain	(1.732.750.620)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	33.309.810.972

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 35.042.561.592, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 1.732.750.620

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.674.227.946.196,00 dan Rp.676.145.753.786,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Akhir
Rp674.227.946.196

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2. PENGUNGKAPAN PENTING CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN 2025

Satuan Kerja : (465678) Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan

Fungsi : (04) Ekonomi

Sub Fungsi : (04.08) Transfortasi

Kode	Kegiatan	BELANJA			OUTPUT				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Setoran	%	
04	ECONOMI	44.354.129.000,00	35.042.561.807,00	79,01%					
08	TRANSPORTASI	44.354.129.000,00	35.042.561.807,00	79,01%					
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	12.082.929.000,00	8.802.463.243,00	72,85%					
1980	Pelayanan Transportasi Udara	1.750.882.000,00	745.932.706,00	42,6%					
81F	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.750.882.000,00	745.932.706,00	42,6%					
001	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	580.052.000,00	559.651.985,00	96,48%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGAWASAN ANGKUTAN UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	1.170.830.000,00	186.280.721,00	15,91%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGENDALIAN ANGKUTAN UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4.342.886.000,00	3.338.529.623,00	76,83%					
81F	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	2.146.258.000,00	1.141.283.973,00	53,16%					
001	Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	867.020.000,00	846.619.943,00	97,65%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGAWASAN BANDAR UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	1.279.238.000,00	294.664.030,00	23,03%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGENDALIAN BANDAR UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN
CDE	Onl Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2.196.628.000,00	2.195.245.650,00	99,94%					
001	Perbaikan Prasarana Bandar Udara	2.196.628.000,00	2.195.245.650,00	99,94%	1,0000	1,0000	Unit	100%	KEGIATAN PERBAIKAN PRASARANA BANDAR UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	5.989.161.000,00	4.720.000.814,00	78,81%					
81F	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	3.933.296.000,00	3.569.183.364,00	91,25%					
001	Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	627.578.000,00	627.577.967,00	100%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
002	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	1.510.133.000,00	1.166.132.252,00	77,22%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMNYAN PENERBANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN
003	Layanan Pengawasan Bidang Keleluasaan dan Pengoperasian Pesawat Udara	695.730.000,00	695.729.863,00	100%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGAWASAN KELELUASAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
004	Layanan Pengendalian Bidang Keleluasaan dan Pengoperasian Pesawat Udara	83.868.000,00	83.682.900,00	99,96%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGENDALIAN KELELUASAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
005	Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan	650.885.000,00	650.884.948,00	100%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGAWASAN NAVIGASI PENERBANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
006	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan	385.282.000,00	385.175.304,00	99,97%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN PENGENDALIAN NAVIGASI PENERBANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA
01F	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	2.055.865.000,00	1.130.817.550,00	55%					
001	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	2.055.865.000,00	1.130.817.550,00	55%	1,0000	1,0000	Layanan	100%	KEGIATAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN
WA	Program Dukungan Manajemen	32.271.200.000,00	26.240.098.584,00	81,31%					

4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	31,846,272,000.00	28,125,400,214.00	88.03%						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,427,256,000.00	25,402,030,872.00	88.1%						
959	Layanan BMN	100,200,000.00	39,998,850.00	39.92%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN BMN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
994	Layanan Perkantoran	25,322,066,000.00	25,082,032,022.00	88.47%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN PERKANTORAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
EBO	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,421,006,000.00	1,023,059,342.00	29.91%						
992	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,690,892,600.00	244,266,775.00	14.45%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
995	Layanan Manajemen Keuangan	1,730,124,000.00	778,802,567.00	45.01%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN MANAJEMEN KEUANGAN SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	347,928,000.00	64,999,900.00	18.68%						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	347,928,000.00	64,999,900.00	18.68%						
990	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	347,928,000.00	64,999,900.00	18.68%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Ketersediaan Transportasi Udara	75,000,000.00	49,998,490.00	66.66%						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	75,000,000.00	49,998,490.00	66.66%						
998	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	75,000,000.00	49,998,490.00	66.66%	1.0000	1.0000	Layanan	100%	KEGIATAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI SUDAH BERJALAN SESUAI RENCANA WALAUPUN TERDAMPAK EFISIENSI ANGGARAN (BLOKIR)	
	Sub Total	266,124,774,000.00	210,256,370,642.00							
	Penyesuaian (Renda DIPAPengembalian Belanja)									
	Total	266,124,774,000.00	210,256,370,642.00							

F.3. PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

- 2. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :
Unit Organisasi :
Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

3. Prioritas Nasional 03 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

4. Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumbar Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Pengutan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

5. Prioritas Nasional 05 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

6. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

7. Prioritas Nasional 07 – Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

8. Prioritas Nasional 08 – Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, ... kegiatan prioritas, yang tersebar di Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Kementerian/Lembaga :

Unit Organisasi :

Satker :

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%

NIHIL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 8:33 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,732,747,897	1,824,227,412	(91,479,515)	(5.015)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,732,747,897	1,824,227,412	(91,479,515)	(5.015)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,732,747,897	1,824,227,412	(91,479,515)	(5.015)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	15,933,849,725	13,669,876,695	2,263,973,030	16.562
Beban Persediaan	234,152,830	525,511,842	(291,359,012)	(55.443)
Beban Barang dan Jasa	6,182,845,366	9,463,058,667	(3,280,214,301)	(34.663)
Beban Pemeliharaan	4,810,178,438	3,625,216,019	1,184,962,419	32.687
Beban Perjalanan Dinas	5,061,777,186	8,717,041,775	(3,655,264,589)	(41.932)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
(1600) KALIMANTAN TIMUR
(465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 8:33 AM

Halaman : 2

lap_lo_saike_r_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,470,727,025	4,110,158,956	360,568,069	8.773
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	36,693,530,570	40,110,864,954	(3,417,334,384)	(8.52)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(34,960,782,673)	(38,286,837,542)	3,325,854,869	(8.687)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(58,374,713)	(718,997,201)	660,622,488	(91.881)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	53,300,000	(53,300,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	58,374,713	772,297,201	(713,922,488)	(92.441)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,723	217	2,506	1,154.839
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,723	217	2,506	1,154.839
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(58,371,990)	(718,996,984)	660,624,994	(91.881)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(35,019,154,663)	(39,005,634,526)	3,986,479,863	(10.22)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(35,019,154,663)	(39,005,634,526)	3,986,479,863	(10.22)

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

MASA PENGGUNA ANGGARAN



FERDINAN NURDIN S.H., S.Si.T., M.M.Tr

NIP. 197806232000121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM

Halaman : 1

lap_ipe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	676,145,753,786	674,560,937,728	1,584,816,058	0.23
SURPLUS/DEFISIT-LO	(35,019,154,663)	(39,005,634,526)	3,986,479,863	(10.22)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(208,463,899)	(22,914,310)	(185,549,589)	809.75
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(208,463,899)	(22,914,310)	(185,549,589)	809.75
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	33,309,810,972	40,613,364,894	(7,303,553,922)	(17.98)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,917,807,590)	1,584,816,058	(3,502,623,648)	(221.01)
EKUITAS AKHIR	674,227,946,196	676,145,753,786	(1,917,807,590)	(0.28)

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 4-



FERDINAN NURDIN S.H.,S.Si.T.,M.M.Tr

NIP 197806232000121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaihan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	150,967,060	190,389,220	(39,422,160)	(20.71)
JUMLAH ASET LANCAR	150,967,060	190,389,220	(39,422,160)	(20.71)
ASET TETAP				
Tanah	600,937,678,000	600,937,678,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	44,606,416,936	46,309,416,581	(1,702,999,645)	(3.68)
Gedung dan Bangunan	76,170,554,684	74,819,298,712	1,351,255,972	1.81
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,007,142,722	9,811,897,072	2,195,245,650	22.37
Aset Tetap Lainnya	0	493,689,027	(493,689,027)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(58,644,813,206)	(56,416,614,826)	(3,228,198,380)	5.72
JUMLAH ASET TETAP	674,076,979,136	675,955,364,568	(1,878,385,430)	(0.28)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,007,600,000	1,007,600,000	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	94,923,037	1,082,483,272	(987,560,235)	(91.23)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,007,600,000)	(1,007,600,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	94,923,037	1,082,483,272	(987,560,235)	(91.23)
JUMLAH ASET	674,322,869,233	677,229,237,058	(2,905,367,825)	(0.43)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	94,923,037	1,082,483,272	(987,560,235)	(91.23)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	94,923,037	1,082,483,272	(987,560,235)	(91.23)
JUMLAH KEWAJIBAN	94,923,037	1,082,483,272	(987,560,235)	(91.23)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	674,227,946,196	676,145,753,786	(1,917,807,590)	(0.28)
JUMLAH EKUITAS	674,227,946,196	676,145,753,786	(1,917,807,590)	(0.28)
JUMLAH EKUITAS	674,227,946,196	676,145,753,786	(1,917,807,590)	(0.28)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	674,322,869,233	677,229,237,058	(2,905,367,825)	(0.43)

Keterangan :
FINAL



BALIKPAPAN, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA
PELAKSANA PENGUNA ANGGARAN

FERDINAN NURDIN S.H., S.Si.T., M.M.Tr
NIP 191806232000121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII 465678

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,009,717,000	1,732,750,620	(276,966,380)	86.22	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,009,717,000	1,732,750,620	(276,966,380)	86.22	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,009,717,000	1,732,750,620	(276,966,380)	86.22	2,197,057,000	1,877,527,629	(319,529,371)	85.46
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	44,354,129,000	35,042,561,592	(9,311,567,408)	79.01	46,376,733,000	42,490,892,523	(3,886,840,477)	91.62
1. Belanja Pegawai	15,963,705,000	15,933,849,725	(29,855,275)	99.81	13,769,865,000	13,669,878,695	(100,006,305)	99.27
2. Belanja Barang	25,528,796,000	16,248,532,660	(9,280,263,340)	63.65	24,432,707,000	22,299,127,143	(2,133,579,857)	91.27
3. Belanja Modal	2,861,628,000	2,860,179,207	(1,448,793)	99.95	6,176,141,000	6,521,888,685	(1,654,252,315)	79.77
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII 465678

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	44,354,129,000	35,042,561,592	(9,311,567,408)	79.01	46,378,733,000	42,490,892,523	(3,887,840,477)	91.62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BALIKPAPAN, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

PENGGUNA ANGGARAN



PERDIN MURDIN S.H.,S.Si.T.,M.M.Tr
197806232000121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	150,897,760	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	69,300	0
0.0	131111	Tanah	600,837,678,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	44,806,416,938	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	76,170,554,684	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	8,019,210,766	0
0.0	134112	Irigasi	1,186,365,236	0
0.0	134113	Jaringan	2,801,566,720	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	39,801,585,287
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,128,068,888
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5,681,011,460
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	464,855,990
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	569,291,581
0.0	162151	Software	1,007,600,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	94,923,037	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,007,600,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	94,923,037
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	35,042,561,582
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,732,750,620	0
0.0	391111	Ekuitas	0	676,145,753,786
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	208,463,899	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	49,501,120
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	21,946,777
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	1,389,450,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	271,850,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,723
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,329,164,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	63,924	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	231,624,740	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	74,031,388	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	41,580,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	16,380,081	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	224,067,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	671,745,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	244,405,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	551,059,433	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	8,953	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,783,283	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (46567B) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 1:26 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 8:34 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	8,623,354	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	38,225,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	137,189,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	31,390,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	567,513,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,954,858,667	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	759,576,132	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,851,878,177	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	632,850	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	146,640,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,306,236,749	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,742,342,525	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	24,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	92,109,576	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	999,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	614,530,535	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	48,883,450	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	20,401,800	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	322,192,604	0
3.0	522141	Beban Sewa	11,998,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,366,757,308	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,627,876,560	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	382,409,652	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	448,491,860	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,029,032,186	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,745,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,642,183,770	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,556,250,049	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,133,493,417	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	56,207,051	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	70,714,796	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11,877,942	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	234,152,830	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,643,060	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	58,374,713	0
JUNLAH			773,668,402,241	773,668,402,241

Keterangan :
FINAL

BALIKPAPAN, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KIPRA PENGGUNA ANGGARAN
FEDINAN NURDIN S.H., S.Si.T., M.M.Tr
NIP. 197806232000121001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 8:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	35,042,561,592
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,732,750,620	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	49,501,120
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	21,946,777
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	1,389,450,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	271,850,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,723
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,329,164,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	64,139	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	231,624,740	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	74,031,388	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	41,580,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16,380,081	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	224,067,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	671,745,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	244,405,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	551,059,433	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,953	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,783,283	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,623,354	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38,225,690	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	137,189,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	31,390,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	567,513,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	7,954,858,667	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	759,576,132	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,851,878,177	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	632,850	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	146,640,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,306,236,749	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,742,342,525	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	92,109,576	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	199,373,730	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	614,530,535	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	48,916,750	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	20,401,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl Data : 29/04/26 8:34 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 8:35 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	322,192,604	0
3.0	522141	Belanja Sewa	11,998,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,366,757,306	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,627,876,560	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	362,409,652	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	448,491,860	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,029,032,186	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,745,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	664,933,557	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2,195,245,650	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	215
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	33,300
JUMLAH			36,775,345,727	36,775,345,727

Keterangan :
FINAL

BALIKPAPAN, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUALA PENGGUNA ANGGARAN
FERDINAND NORDIN S.H., S.St.T., M.M.Tr
97806232000121001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN 2025 (AUDITED)

Kode dan Nama UAKPA : (465678) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII
Kode dan Nama UAPPAW : (1600) KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Eselon 1 : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Kode dan Nama K/L : (022) KEMETRIAN PERHUBUNGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akruel Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan Akruel	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TMI Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNPB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal			Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya

Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/8/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tuel pengamanan, Pita Cukai, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiproskat pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiproskat)			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyakuran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya

	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?		V	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		V	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/LAL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/8)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	V		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111828, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Penyusun LKKL,



(HASANAH)

NIP. 19760829 201012 2 001



Salikpapan, 29 April 2026

(FERIZNAN NURDIN, S.H, SIT, M.M Tr)
NIP. 19780623 200012 1 001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Tgl. Cetak 29/04/2026 10:44 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	189,939,260	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	449,960	0
0.0	131111	Tanah	600,937,678,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	46,309,416,581	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	74,819,298,712	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	5,823,965,116	0
0.0	134112	Irigasi	1,186,365,236	0
0.0	134113	Jaringan	2,801,566,720	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	493,689,027	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	40,475,574,564
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,589,029,639
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,547,518,043
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	305,915,801
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	498,578,785
0.0	162151	Software	1,007,600,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,082,483,272	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,007,600,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,082,483,272
0.0	391111	Ekuitas	0	676,145,753,786
JUMLAH			734,652,451,884	734,652,451,884

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 465678 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/26 10:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 29/4/26 8:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,928,228,000	4,329,168,000	4,329,164,600	0	4,329,164,600	100	3,400
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	98,000	65,000	64,139	215	63,924	98.34	1,076
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	494,632,000	231,626,000	231,624,740	0	231,624,740	100	1,260
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	98,926,000	74,033,000	74,031,388	0	74,031,388	100	1,612
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	41,580,000	41,580,000	0	41,580,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,345,000	16,613,000	16,380,081	0	16,380,081	98.6	232,919
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	244,346,000	224,089,000	224,067,480	0	224,067,480	100	1,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,028,998,000	701,252,000	671,745,000	0	671,745,000	95.79	29,507,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	294,840,000	244,405,000	244,405,000	0	244,405,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	6,131,733,000	5,662,811,000	5,833,062,428	215	5,833,062,213	99.48	29,748,787
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	77,129,000	551,061,000	551,059,433	0	551,059,433	100	1,567
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	98,000	12,000	8,853	0	8,953	74.61	3,047
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,484,000	44,786,000	44,783,283	0	44,783,283	99.99	2,717
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,887,000	8,626,000	8,623,354	0	8,623,354	99.97	2,646
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,120,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,055,000	38,226,000	38,226,690	0	38,226,690	100	310
511628	Belanja Uang Makan PPPK	20,532,000	137,248,000	137,188,000	0	137,188,000	99.96	59,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	31,390,000	31,390,000	0	31,390,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	128,325,000	818,909,000	818,839,713	0	818,839,713	99.99	69,287
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	700,000,000	567,548,000	567,513,000	0	567,513,000	99.99	35,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	700,000,000	567,549,000	567,513,000	0	567,513,000	99.99	36,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,714,498,000	7,954,859,000	7,954,858,667	0	7,954,858,667	100	333
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	122,050,000	759,577,000	759,576,132	0	759,576,132	100	868
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,836,548,000	8,714,436,000	8,714,434,799	0	8,714,434,799	100	1,201
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,796,606,000	15,963,705,000	15,933,849,940	215	15,933,849,725	99.81	29,855,275
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,470,364,000	1,855,596,000	1,851,878,177	0	1,851,878,177	99.8	3,719,823

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/26 10:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 29/4/26 8:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	91,200,000	91,200,000	0	0	0	0	91,200,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120,000,000	120,000,000	632,850	0	632,850	0.53	119,367,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	164,520,000	146,640,000	146,640,000	0	146,640,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,675,879,000	3,288,315,000	1,306,236,749	0	1,306,236,749	39.6	1,992,078,251
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,521,963,000	5,511,753,000	3,305,387,778	0	3,305,387,778	59.97	2,206,365,224
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,001,991,000	2,527,502,000	1,742,342,525	0	1,742,342,525	68.94	785,159,475
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	108,600,000	100,200,000	24,000,000	0	24,000,000	23.85	76,200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	859,993,000	838,342,000	82,109,576	0	82,109,576	10.99	746,232,424
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,970,584,000	3,466,044,000	1,858,452,101	0	1,858,452,101	53.62	1,607,591,899
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	750,000,000	800,000,000	199,373,730	0	199,373,730	24.92	600,626,270
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	750,000,000	800,000,000	199,373,730	0	199,373,730	24.92	600,626,270
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	800,000,000	639,034,000	614,530,535	0	614,530,535	96.17	24,503,465
522112	Belanja Langganan Telepon	120,000,000	48,824,000	48,916,750	33,300	48,883,450	99.92	40,550
522113	Belanja Langganan Air	120,000,000	25,000,000	20,401,900	0	20,401,900	81.61	4,598,100
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	606,000,000	343,153,000	322,192,604	0	322,192,604	93.89	20,960,396
522141	Belanja Sewa	1,198,000,000	981,082,000	11,998,000	0	11,998,000	1.22	969,084,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,844,000,000	2,037,193,000	1,018,039,789	33,300	1,018,006,489	49.97	1,019,186,511
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,928,130,000	2,366,784,000	2,366,757,306	0	2,366,757,306	100	26,694
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,425,230,000	1,681,493,000	1,627,876,560	0	1,627,876,560	96.81	53,616,440
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	213,089,000	363,089,000	362,409,652	0	362,409,652	99.81	679,348
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	249,168,000	450,000,000	448,491,860	0	448,491,860	99.66	1,508,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,815,617,000	4,861,366,000	4,805,535,378	0	4,805,535,378	98.85	55,830,622
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,773,318,000	6,279,010,000	5,029,032,186	0	5,029,032,186	80.09	1,249,977,814
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102,000,000	40,800,000	0	0	0	0	40,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	32,745,000	32,745,000	0	32,745,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,140,662,000	2,499,885,000	0	0	0	0	2,499,885,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	11,015,980,000	8,852,440,000	5,061,777,186	0	5,061,777,186	57.18	3,790,662,814
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	25,918,144,000	25,528,796,000	16,248,565,960	33,300	16,248,532,660	63.65	9,280,263,340
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 465678
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/26 10:40 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 29/4/26 8:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198,357,000	665,000,000	664,933,557	0	664,933,557	99.99	66,443
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	198,357,000	665,000,000	664,933,557	0	664,933,557	99.99	66,443
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	2,196,628,000	2,195,245,650	0	2,195,245,650	99.94	1,382,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	2,196,628,000	2,195,245,650	0	2,195,245,650	99.94	1,382,350
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	198,357,000	2,861,628,000	2,860,179,207	0	2,860,179,207	99.95	1,448,793
	JUMLAH BELANJA	39,913,107,000	44,354,129,000	35,042,595,107	33.515	35,042,561,592	79.01	9,311,567,408

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
SATUAN KERJA : 485678 **KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 29/04/26 10:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28,467,000	49,501,120	0	49,501,120	173.89
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	21,946,777	0	21,946,777	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	28,467,000	71,447,897	0	71,447,897	250.98
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	1,843,750,000	1,389,450,000	0	1,389,450,000	75.36
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	137,500,000	271,850,000	0	271,850,000	197.71
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	1,981,250,000	1,661,300,000	0	1,661,300,000	83.85
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,723	0	2,723	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,723	0	2,723	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,009,717,000	1,732,750,620	0	1,732,750,620	86.22
	JUMLAH PENDAPATAN	2,009,717,000	1,732,750,620	0	1,732,750,620	86.22